

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, sehingga akan menjadi jelas hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

7.1 Kebijakan Umum

Kebijakan Umum disini adalah arah kebijakan untuk memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

7.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah secara umum terbagi dalam 3 (tiga) jenis program, yaitu program kewilayahan, program lintas SKPD dan program SKPD.

Program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Program lintas SKPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Program SKPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan. Strategi, arah kebijakan, indikator, capaian kinerja, program dan bidang yang menjadi urusan SKPD disajikan pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah Kota Cirebon 2013-2018

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1.1.1.1.1 Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur	1.1.1.1.1 Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kotak pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS	Pelaksanaan jadwal pengajian rutin bulanan di SKPD	0%	100%	Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur	Otonomi Daerah	BK.Diklat
1.2.1.1.1 Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan	1.2.1.1.1 Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan	Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya	30%	90%	Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
1.2.2.1.1 Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan dan Pelaksanaan lomba secara berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota	1.2.2.1.1 Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota.	prestasi 3 besar tingkat propinsi	peringkat 11 tingkat propinsi	3 besar tingkat Propinsi	Program Peningkatan kompetensi Keagamaan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
1.2.3.1.1 Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama	1.2.3.1.1 Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama	Kasus bernuansa SARA	0 kasus	0 kasus	Program Kerukunan Umat Beragama	Otonomi Daerah	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah	2.1.1.1.1 Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan	Rasio Aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sebelumnya telah mengikuti diklatpim	60%	100%	Program Pendidikan Kedinasan	Otonomi Daerah	BK.Diklat

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
	2.1.1.1.1.2	Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan	Tersedianya sistem kesejahteraan pegawai	0%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otonomi Daerah	BK.Diklat	
2.1.1.2.1	Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS	2.1.1.2.1.1	Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat	Menurunnya 60% kasus pelanggaran disiplin/1000 PNS	9 kasus/1000 PNS	3 kasus/1000 PNS	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otonomi Daerah	BK.Diklat
2.1.2.1.1	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	2.1.2.1.1.1	Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga	Opini penilaian BPK terhadap keuangan dan aset daerah menuju WTP di tahun 2018	WDP	WTP	Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah/ DPPKD
2.1.2.1.2	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	2.1.2.1.2.1	Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah	Meningkatnya PAD	22.96%	75%	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Otonomi Daerah	DPPKD
				APBD tepat waktu	90%	100%	Program Peningkatan Kualitas Penganggaran dan Realisasi APBD		
				Transparansi/publikasi APBD	100%	100%	Program Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi APBD		
2.1.2.1.3	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuda	2.1.2.1.3.1	Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)	Menurunnya jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan 6%/tahun	94 temuan	70 temuan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Otonomi Daerah	Inspektorat
				Meningkatnya rasio tenaga pemeriksa (APIP) terhadap jumlah SKPD	23/52	43/52	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Otonomi Daerah	Inspektorat

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2.1.2.2.1 Pelaksanaan proses perencanaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan	2.1.2.2.1.1 Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPDP (jumlah program RKPDP tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan X 100 %	60%	100%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.1.2.2.2 Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD	2.1.2.2.2.1 Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD	Rasio perencana bersertifikat / jumlah aparatur perencana	0%	50%	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	2.1.2.2.2.2 Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah	Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah	25%	100%	Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.1.2.2.3 Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah	2.1.2.2.3.1 Membangun sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah serta mempublikasikan hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah.	Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan	100%	100%	Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPDP	100%	100%	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2.1.3.1.1 Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan	2.1.3.1.1.1 Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip	Rasio SKPD yang tertib administrasi kearsipan / jumlah SKPD	3/70	70/70	Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan	Kearsipan	Bapusipda
2.1.3.2.1 Penyediaan arsip dalam bentuk digital	2.1.3.2.1.1 Menyediakan dokumen arsip secara digital	Jumlah arsip vital dan statis	530 arsip	1060 arsip	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Kearsipan	Bapusipda
2.1.4.1.1 Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan	2.1.4.1.1.1 Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, serta penerapan insentif dan disinsentif informasi	Penambahan Jumlah Kewenangan Perizinan	22 jenis	50 jenis	Program penataan dan pelayanan perijinan	Penanaman Modal	BPMPP
		tersedianya sistem	0 sistem	50%			
		tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi	0 dasar hukum	1 dasar hukum			
2.1.4.2.1 Peningkatan iklim investasi yang kondusif	2.1.4.2.1.1 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi	Jumlah kerjasama investasi	-	2 kerjasama/ tahun	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	BPMPP

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	2.1.4.2.1.2 Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal	Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN	PMA 212.574.000 .000	PMA 400.000.00 0.000	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi invtasi	Penanaman Modal	BPMPP
			PMDN 380.825.698 .000	PMDN 600.000.00 0.000			
2.1.5.1.1 Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan	2.1.5.1.1.1 Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KTP dan KK	73.45% dan 100%	100% dan 100%	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kependudukan dan Catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian	88.00%	100%	Program pelayanan pencatatan sipil	Kependudukan dan Catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan	10%	5%	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Kependudukan dan Catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tersedianya pedoman/ arahan kebijakan kependudukan 100%	100%	100%	Program perencanaan kebijakan kependudukan	Kependudukan dan Catatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.2.1.1.1 Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel	2.2.1.1.1.1 Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance	Rasio Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi/ Jumlah SKPD se Kota Cirebon	76%	100%	Program Penataan Kelembagaan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
		Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo	60%	100%	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
2.3.2.1.1 Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon	2.3.2.1.1.1 Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon	Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU)	0 titik	8 titik	Program Pembinaan Pemerintahan	Otonomi Daerah	Sekretariat Daerah
2.4.1.1.1 Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi	2.4.1.1.1.1 Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka infrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egovernment	Tersedia dan terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai sarana penunjang peningkatan kinerja aparatur	60%	100%	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Komunikasi dan Informatika	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
3.1.1.1.1 Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan	3.1.1.1.1.1 Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan	Rasio jumlah PNS, pelajar dan mahasiswa yg memperoleh pembinaan wawasan kebangsaan	6%	30%	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
3.2.1.1.1 Peningkatan peranserta dan kemitraan masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat	3.2.1.1.1.1 Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum	rasio kader masyarakat bidang kesbangpol	1org/RW	5org/RW	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pol PP
	3.2.1.1.1.2 Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling	Terselenggaranya pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	rasio tenaga linmas per RT 1300/1358	rasio tenaga linmas per RT 1358/1358	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pol PP
		Jumlah RW yg melaksanakan siskamling	10%	50%			Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
	3.2.1.1.1.3	Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas	Meningkatnya frekuensi patroli lingkungan 3 kali/hari	1 kali/hari	3 kali/hari	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor SatPol PP
3.2.1.2.2 Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum	3.2.1.2.2.1	Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum	Rasio jumlah pemuda yang dibina dibanding jumlah pemuda yang ada di lokasi daerah rawan ketertiban umum 1.5 % (515 orang dari 34.289 orang)	0%	1,52 %	Program Pembinaan Pemuda di Daerah Rawan Ketertiban Umum	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	3.2.1.2.2.2	Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum	Rasio Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dibanding jumlah usia pemuda di lokasi rawan ketertiban umum (250 dari 34.289)	0	250 orang	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
3.3.1.1.1 Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda	3.3.1.1.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan aparaturnya dalam sosialisasi dan penerapan perda	Penurunan jumlah kasus pelanggaran Perda dari 10 menjadi 5 kasus	10 kasus	5 kasus	Program Penegakan Peraturan Daerah	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kantor SatPol PP
3.4.1.1.1 Penilaian K-3 tingkat RW	3.4.1.1.1.1	Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat	Rasio RW K3	10%	50%	Program RW Bersih	Pemberdayaan Masyarakat Desa	KLH
3.5.1.1.1 Optimalisasi rekayasa, sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titik rawan kemacetan dan kecelakaan	3.5.1.1.1.1	Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas serta rekayasa terhadap perlintasan sebidang	Terwujudnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran berlalulintas	75%	100%	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
3.5.1.1.2 Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas	3.5.1.1.2.1	Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor	Tersedianya sarana dan fasilitas LLAJ yang memadai	82%	100%	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan	60	100	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
3.5.1.1.3 Peningkatan Keselamatan Pelayaran	3.5.1.1.3.1 Meningkatkan keselamatan pelayaran	Menurunnya kasus kecelakaan pelayaran	60	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
3.5.1.1.4 Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih	3.5.1.1.4.1 Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir	Terwujudnya perparkiran yang tertib dan aman	60	100	Program Peningkatan Pelayanan Parkir	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
3.6.1.1.1 Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL	3.6.1.1.1.1 Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL	Rasio PKL yang belum menempati lokasi yang telah ditetapkan	70%	40%	Program Pembinaan Pedagang Kakilima	Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
		Jumlah PKL yang dibina 3% dari PKL yang terdaftar	300 PKL	1800 PKL			
		Jumlah Kawasan Peruntukan bagi PKL	0	5			
3.7.1.1.1 Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana	3.7.1.1.1.1 Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 100%	30%	100%	Program Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran	Otonomi daerah	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
		Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	80%	Program Penanggulangan Korban Bencana	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	0%	80%			Transmigrasi
3.7.1.1.2 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana	3.7.1.1.2.1 Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan	Jumlah aparatur dan masyarakat di tingkat Kelurahan yang dilatih 300 orang /tahun	600 org	2100 org	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Otonomi daerah	Kantor Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
4.1.1.1.1 Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya	4.1.1.1.1.1 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi	Indeks kepuasan Layanan	40%	85%	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APK SD	100%	100%	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM SD	100%	100%			
		Angka Putus Sekolah SD	0.02%	0%			
		APK SMP	100%	100%			
		APM SMP	89.66%	100%			
		Angka Putus Sekolah SMP	0%	0%			
		APK SMA	80.30%	100%	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		APM SMA	56.84%	100%			
		Angka Putus Sekolah SMA	0.02	0%			
		APK SMK	61.34%	100%			
		APM SMK	43.48%	100%			
		Angka Putus Sekolah SMK	1.43%	0%			
		4.1.1.1.2 Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah		Penyelenggaraan Paket A dan B tiap kelurahan	20 orang pada 2 kelurahan	50 orang pada 22 kelurahan	Program Pendidikan Non Formal
236 org pada 13 kelurahan	250 org pada 15 kelurahan						
4.1.1.1.2 Peningkatan mutu tenaga pendidik	4.1.1.1.2.1 Meningkatkan mutu penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D4	74.39%	100%	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Guru SD/MI yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	48.05%			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
		Guru SMP/MTS yang memenuhi kualifikasi S1/D4	88.82%	100%				
		Guru SMP/MTS yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	52.14%	77%				
		Guru SMA/SMK /MA yang memenuhi kualifikasi S1/D4	93.66%	100%				
		Guru SMA/SMK /MA yang memenuhi sertifikasi tenaga pendidik	48.49%	82%				
4.1.1.2.1	Pengembangan pendidikan non formal dan informal	4.1.1.2.1.1 Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW	Pengembangan lembaga PAUD	188 PAUD di 135 RW	247 PAUD di 247 RW	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		4.1.1.2.1.2 Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan	Perpustakaan tingkat RW	1 Perpus RW pada 1 Kelurahan	6 Perpus RW pada 5 Kelurahan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Bapusipda
4.2.1.1.1	Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat	4.2.1.1.1.1 Mengembangkan kawasan percontohan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat disemua tatanan kehidupan (Rukun Warga, Sekolah, Perkantoran, Tempat tempat Umum)	Kelurahan siaga aktif	42%	75%	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		4.2.1.1.1.2 Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat	Jumlah KK ber PHBS	54.80%	75%			
4.2.1.1.2	Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas	4.2.1.1.2.1 Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	90,78%	100%	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	80%	100%			
			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	70%	84%			
			Cakupan kunjungan bayi	85,74%	88%			
			Cakupan pelayanan anak balita	85,74%	88%			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir						
		Cakupan peserta KB aktif	77,7%	78%	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan			
		Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	100%	100%						
		Presentase kualitas air minum memenuhi syarat	97,9%	98,5%						
		Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	91%	95%						
		Penemuan Kasus AFP	9 orang	6						
		Kesembuhan penderita TBC BTA Positif	83,14%	85%						
		Cakupan balita dengan Pneumonia yang diobati	99.60%	91%						
		Penderita DBD yang ditangani	100%	100%						
		Penemuan dan Penanganan penderita diare	100%	100%						
		Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%						
		Cakupan kunjungan ibu hamil K4	89,97%	95%				Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	88.47%	95%						
		Cakupan pelayanan nifas	85.03%	91%						
4.2.1.1.3 Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas	4.2.1.1.3.1 Menyediakan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin 100%	90,78%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan			
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%						
	4.2.1.1.3.2 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS	100%	100%	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Kesehatan	RSUD Gn .Jati			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
	4.2.1.1.3.3	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III	Tingkat kepuasan pelayanan kelas III	N/A	75 poin	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan	RSUD Gn .Jati	
4.2.2.1.1	Pengendalian kelahiran	4.2.2.1.1.1	Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan	Meningkatkan peserta KB baru	100%	100%	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana	BPMPPKB
					(3200 akseptor)	(3400 akseptor)			
			Tercapainya PUS istri di bawah 20 tahun sebanyak 3,5%	19 tahun	21 tahun				
4.3.1.1.1	Pembinaan atlet berprestasi	4.3.1.1.1.1	Melakukan pembinaan atlet berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan	10 besar tingkat Propinsi	Peringkat 18	Pringkat 10 besar	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
4.3.1.1.2	Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	4.3.1.1.2.1	Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga	Kawasan Olah Raga Bima siap pakai 100% di tahun 2018	0%	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
4.4.1.1.1	Penetapan kalender budaya	4.4.1.1.1.1	Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon dan menjadikan Kota Cirebon sebagai pusat Event Budaya Khas Cirebon se Wilayah Cirebon, dengan meningkatkan dukungan dan keterlibatan Keraton.	Cakupan Gelar Seni (3 dari 4 kegiatan SPM)	100%	100%	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Cakupan Kajian Seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 kegiatan SPM)	20%	100%			
4.4.1.2.1	Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya	4.4.1.2.1.1	Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian	Cakupan fasilitas seni (jumlah kegiatan yang dilaksanakan dibagi 3 kegiatan SPM)	100%	100%	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
				Cakupan tempat (tersedianya 2 tempat)	50%	2 lokasi			
				Terlindunginya nilai budaya sebesar 5% pada tahun 2018	5%	5%			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Rasio bangunan cagar budaya (Keraton) yang terevitalisasi di Kota Cirebon	10%	30%			
		Jumlah pemilik cagar budaya yang bersedia bekerjasama	10%	50%			
4.5.1.1.1 Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan)	4.5.1.1.1 Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM	Berkembangnya KUMKM ; 250 KUMKM	250 KUMKM	250 KUMKM	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
	4.5.1.1.2 Meningkatkan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan	Meningkatnya kemitaraan, dan berwirausaha dalam manajemen usaha Jumlah KUMKM yang dibina 455 orang	455 KUMKM	455 KUMKM)	Program pengembangan kewirausahawan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
		Jumlah Koperasi Aktif sebanyak 478 kop	200 koperasi	630 koperasi	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
4.5.1.1.2 Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja	4.5.1.1.2.1 Meningkatkan kompetensi BLK	standar BLK	Non akreditasi	Tipe C	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.5.1.1.2.2 Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung	Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	67.31%	75%			
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	8.56%	60%			
		Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	0%	60%			
4.5.1.1.3 Peningkatan keterampilan, penempatan dan perlindungan tenaga kerja	4.5.1.1.3.1 Meningkatkan perlindungan tenaga kerja	pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek	32.14%	50%	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Besaran Pemeriksaan perusahaan	5%	45%			
		Besaran Pengujian peralatan di Perusahaan	17.56%	50%			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	7,14%	50%	Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	4.5.1.1.3.2 Meningkatkan pencari kerja yang ditempatkan	Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30.76%	60%	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.5.1.1.4 Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan	4.5.1.1.4.1 Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan	ketersediaan energi dan protein perkapita	86%	90%	Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan
			(1.894 kl/kal/hari)	(1.980 kl/kal/hari)			
		Penguatan cadangan pangan	50%	60%			
		Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah	80%	90%			
		Stabilitas harga dan pasokan pangan	0%	90%			
		Penanganan daerah rawan pangan	50%	60%			
		peningkatan skor pola pangan harapan	84%	90%			
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	59%	80%	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketahanan Pangan	Kantor Ketahanan Pangan	
4.5.1.1.4.2 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasanya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan	Terbangunnya Sub Terminal Agribisnis (STA)	Tidak tersedia	1 unit	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, peternakan, dan perikanan;	Pertanian	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	
	Terehabilitasinya lahan kritis / penghijauan kota	188Ha	213 ha	Program Rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian	
4.5.1.1.4.3 Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura per hektare 3% tiap tahun	Padi 5.464 ton/ha	Padi 6.252 ton/ha	Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan	

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	secara sinergi dan partisipatif						dan Pertanian
			Palawija 434 ton/ha	Palawija 9.260 ton/ha			
			Hortikultura 479 ton/ha	Hortikultura 572 ton/ha			
		Jumlah produksi daging sapi 318,780 ton pada tahun 2012 menjadi 467,696 ton pada tahun 2018 , daging babi 47,197 ton menjadi 56,252 ton	Jumlah produksi daging sapi 318,780 ton , daging babi 47,197 ton	daging sapi 481,769 ton, daging babi 57,945 ton	Prog. Peningkatan Produksi Peternakan	Pertanian	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
		Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap sebesar 3%/tahun	4.334 Ton	4.984 Ton	Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
		Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dan sebesar 3%/tahun	226 Ton	260 Ton	Program peningkatan produksi perikanan budidaya	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian
4.5.1.2.1 Peningkatan promosi wisata	4.5.1.2.1.1 Meningkatkan promosi wisata budaya khas Cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif	Obyek Wisata yang dikembangkan	0 Kawasan	4 kawasan	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
4.6.1.1.1 Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan	4.6.1.1.1.1 Menyediakan satu data keluarga miskin	Tersedianya Integrasi Data Keluarga Miskin	Belum tersedia	1 data	Program satu data keluarga miskin	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	4.6.1.1.1.2 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan	Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan	50%	100%	Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4.6.1.1.2 Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin	4.6.1.1.2.1 Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO	Rasio siswa gakin yg memperoleh pendidikan / jumlah siswa gakin pendidikan	90%	100%	Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	4.6.1.1.2.2 Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan	Rasio KK miskin yg memperoleh pendampingan pelayanan kesehatan rujukan	100% (13.395 kasus)	100% (24.523 kasus)	Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	4.6.1.1.2.3 Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin	Rasio KK miskin rata-rata yg memperoleh akses pelayanan / jumlah KK miskin	10%	30%	Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin	Pekerjaan umum	Dinas PUPESDM
	4.6.1.1.2.4 Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah	Rasio KK Miskin yg memperoleh bantuan perbaikan / jumlah KK miskin	10%	30%	Program penataan kawasan perumahan keluarga miskin	Perumahan	Dinas PUPESDM
	4.6.1.1.2.5 Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi	Rasio Pemberian Makanan Pendamping ASI usia 6-24 bulan pada keluarga miskin	18,5%	50%	Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100%	100%				
4.6.1.1.3 Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin	4.6.1.1.3.1 Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin	lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid	3 kop	28 kop	Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin	Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM
4.7.1.1.1 Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	4.7.1.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak	Penanganan Pengaduan	0%	100%	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	BPMPPKB
	4.7.1.1.1.2 Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak	Rasio RW layak anak per kelurahan	1 RW / 22 kelurahan	10 RW / 22 Kelurahan	Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan, Kecamatan, dan BPMPPKB
4.8.1.1.1 Penanganan PMKS	4.8.1.1.1 Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial	Peningkatan keterampilan tenaga pengurus panti asuhan/jompo	20%	100%	Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Jumlah Potensi Sumberdaya Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	7 PSKS dari 12 PSKS (58,33%)	12 PSKS (100%)	Program Penguatan Jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah MOU kemitraan dalam penanganan PMKS	0 (0%)	12 MOU (100%)			
		PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	23.31%	80%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0.31%	80%			
		Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	87.50%	80%			
		Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	75%	60%			
		Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	3.16%	40%			
4.9.1.1.1 Penyajian data terpilah	4.9.1.1.1 Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatan pembangunan	Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial	50%	100%	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BPMPKKB
5.1.1.1.1 Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan	5.1.1.1.1 Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang	Terbentuknya posyantek di 5 kecamatan dan wartek di 22 kelurahan	0	5 posyantek dan 22 wartek	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Desa	BPMPKKB
5.1.2.1.1 Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat	5.1.2.1.1 Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW	Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat / nilai bantuan RW	40%	65%	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat	BPMPKKB

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.1.1.1.1 Peningkatan ruang terbuka hijau publik	6.1.1.1.1.1 Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah, optimalisasi area sempadan jalan, sungai dan laut serta ruang terbuka lainnya melalui penanaman pohon sebagai peneduh dan penguatan kelembagaan yang menangani asset fasos/fasum dalam rangka peningkatan RTH	Bertambahnya RTH Publik menjadi 12 %	342,9 ha (9% luas kota)	457,2 ha (12% luas kota)	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Taman publik yang ditata 80%	39%	80%			
		Tersedianya acuan kebijakan pengelolaan RTH	0	1 perda			
		Luas areal permakaman bertambah 2 ha	2.24 ha	4.24 ha	Program Pembebasan Lahan untuk Fasilitas Umum	Pertanahan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Tersedianya lahan untuk fasilitas persampahan (TPA)	15 Ha	20 Ha			
6.1.2.1.1 Penyediaan data dan informasi serta instrument SDA dan LH secara berkesinambungan	6.1.2.1.1.1 Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penyediaan informasi SDA dan lingkungan hidup, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer, penanganan tanah timbul dan kerusakan ekosistem di wilayah pesisir dan laut	Meningkatnya Jumlah kelengkapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingk. 69 % (<i>Jumlah ketersediaan instrumen dibagi standar instrumen yang ada di UU32/2009 dikali 100%</i>)	46 %	69 %	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pelayanan informasi kualitas air dan udara (Jumlah titik pantau kualitas air : 28 titik dan udara ambient : 20 titik (jumlah titik pantau yang diuji dibagi jumlah titik pantau keseluruhan dali 100%))	100 %	100 %			
		Meningkatnya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa 100% (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	100 %	100 %			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.1.2.2.1 Penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	6.1.2.2.1.1 Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi	Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran air 100% (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	80%	100 %	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak 100% % (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	80%	100 %			
		Meningkatnya pelayanan pengendalian B3 dan limbah B3 10% % (jumlah perusahaan yang dipantau dibagi jumlah perusahaan target pantau dikali 100%)	0 %	3 %			
		Meningkatnya pelayanan pengaduan masyarakat akibat pencemaran atau kerusakan LH 100% % (jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah jumlah pengaduan yang masuk dikali 100%)	80%	100 %			
6.1.2.3.1 Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim	6.1.2.3.1.1 Mengendalikan perusakan dan konservasi SDA melalui pemantauan pemanfaatan SDA dan perubahan iklim	Meningkatnya Pelayanan Konservasi Air (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	0 %	100 %	Program perlindungan dan konservasi SDA	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Meningkatnya Pelayanan Konservasi Lahan/Tanah (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	0 %	100 %			
		Meningkatnya Pelayanan Konservasi Udara/Atmosfer (jumlah laporan yang tersusun dibagi jumlah target laporan yang tersusun dikali 100%)	0 %	100 %			
6.1.2.4.1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	6.1.2.4.1.1 Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan LH melalui bank Sampah, Green Office, Sekolah Berbudaya Lingkungan dan Adipura	Meningkatnya Jumlah Bank Sampah Tingkat RW (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%)	9 %	100 %	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat	Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan (jumlah output target dibagi jumlah output target akhir dikali 100%)	4 %	20 %			
		Meningkatnya Jumlah Green Office (SKPD)	2 %	100 %			
		Meningkatnya perolehan point Adipura (nilai yang diperoleh dibagi 75 dikali 100 %)					
6.1.3.1.1 Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	6.1.3.1.1.1 Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR, meningkatkan TPA Kopiluhur menjadi Sanitary Landfill, meningkatkan koordinasi regional dalam rangka TPA regional	Meningkatnya volume sampah terangkut M3/Hari	700 M3	1000 M3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
		Meningkatnya Volume sampah di tampung M3/Hari	470 M3 / Hari	1170 M3 / Hari			
		Pengelolaan sampah berbasis RW / RW zero waste	0%	20 % RW			

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.2.1.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.1.1.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, Mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota 100%	85%	100%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
		Tersedianya Jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	90%	100%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
6.2.2.1.1 Pengembangan sarana dan prasarana drainase	6.2.2.1.1.1 Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder	Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan	18 titik	10 titik	Program Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
6.2.2.1.2 Pemeliharaan sarana prasarana drainase	6.2.2.1.2.1 Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder	Meningkatnya Kondisi saluran drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	65%	100%	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
6.2.2.1.3 Konservasi sumberdaya air	6.2.2.1.3.1 Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah	Meningkatnya media resapan, terbangunnya kolam retensi/embung	0	2 titik	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
		Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai	90%	100%	Program Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.2.3.1.1 Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	6.2.3.1.1.1 Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat	Cakupan pelayanan air limbah	92%	100%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
6.2.4.1.1 Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	6.2.4.1.1.1 Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas air baku.	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih non perpipaan	4%	20%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Pekerjaan Umum	Dinas PUPESDM
6.3.1.1.1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	6.3.1.1.1.1 Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang selama 12 hari kerja dan terkendalinya pemanfaatan ruang	100%	100%	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas PUPESDM
	6.3.1.1.1.2 Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui	Tersedianya sistem informasi 100%	0%	100%	Program Penyediaan Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas PUPESDM

Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6.4.1.1.1 Penataan lingkungan kawasan permukiman kota	6.4.1.1.1 Menata lingkungan permukiman meningkatkan penyediaan fasilitas umum dan jalan alternatif ke kawasan pengembangan perumahan	berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 30% menjadi 20%	30%	20%	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Perumahan	Dinas PUPESDM
6.4.2.1.1 Pengembangan rumah sehat sederhana	6.4.2.1.1 Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekati tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya	Meningkatnya rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	18.456 rumah	19.456 rumah	Program Pengembangan Perumahan	Perumahan	Dinas PUPESDM
6.4.3.1.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan	6.4.3.1.1.1 Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana yang menggunakan teknologi tinggi dan tepat guna, Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayanan angkutan hari-hari besar	Cakupan Wilayah pelayanan angkutan umum	60%	100%	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi
	6.4.3.1.1.2 Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda	Ketersediaan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kaki, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan pemakai sepeda	60%	100%	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Perhubungan	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi